

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Perilaku yang direncanakan (*Theory of Planned Behavior*)

Menurut Ajzen (1991) dalam (Suryanto et al., 2017) teori perilaku yang direncanakan (*theory of planned behavior*) beranggapan manusia biasanya akan berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan lingkungannya. Teori ini bertujuan dan bermanfaat untuk memahami pengaruh motif perilaku, baik kemauan individu itu sendiri ataupun bukan dari kemauan individu tersebut. Menurut Januarti (2011) dalam (Suryanto et al., 2017) teori perilaku yang direncanakan mempunyai fungsi terkait dengan sikap dasar seseorang, menggambarkan pengaruh sosial dan berkaitan dengan isu kontrol. Teori ini menerangkan sikap dasar atau kepribadian seseorang bisa terbentuk atas respon dari seseorang terhadap lingkungan, objek, dan intuisi.

Berhubungan dengan penelitian ini, sikap kompeten yang dimiliki seorang auditor mencerminkan kemahiran berfikir yang sifatnya berkembang, dinamis, dan *rollover* serta bisa diraih setiap waktu. Selain itu berkaitan dengan sikap skeptisme yang ditunjukkan seorang auditor merupakan sikap yang selalu mengevaluasi dan mempertanyakan pelaksanaan auditnya secara kritis. Kemudian berhubungan dengan sikap independensi seorang auditor merupakan sikap bebas dari pengaruh yang tidak dikendalikan oleh pihak lain serta tidak bergantung pada orang lain.

2. Teori *fraud triangle*

Kecurangan (*fraud*) secara umum merupakan tindakan menyimpang yang sengaja dilakukan untuk menipu, mengelabui atau memanipulasi. *Fraud* adalah serangkaian ketidaksinambungan tentang perbuatan yang menentang hukum di lakukan secara sengaja untuk tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh beberapa orang dari dalam maupun dari luar organisasi, supaya menbuahkan keuntungan baik secara langsung maupun tidak langsung (Karamoy & Wokas, 2015). Kurangnya pengetahuan dan pemahaman auditor mengenai *fraud* yang sering terjadi dapat menimbulkan hal yang tidak efektif atau kesulitan bagi auditor dalam melaksanakan tugasnya. Diperoleh 3 (tiga) faktor yang mendorong seseorang berbuat kecurangan (*fraud*), dikenal sebagai "*fraud triangle*" Suradji (2007) dan Tuanakotta (2007) dalam (Widiyastuti & Pamudji, 2009) yaitu:

- a. *Opportunity* (kesempatan), kesempatan untuk melakukan kecurangan tergantung pada situasi pelaku dengan objek. biasanya, manajemen suatu organisasi atau perusahaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan dibanding karyawan.
- b. *Pressure* (tekanan), tekanan untuk melakukan kecurangan bisa lebih banyak tergantung dengan kondisi individu, contohnya sedang menghadapi masalah keuangan, kebiasaan buruk seseorang berjudi dan peminum, mempunyai harapan atau tujuan yang tidak realistis.

c. *Rationalization* (rasionalisasi), rasionalisasi terjadi jika seseorang menciptakan pembenaran atas kecurangan yang dilakukannya.

Teori tersebut berkaitan dengan *red flags* yang merupakan kondisi yang janggal dari keadaan normal dimana adanya petunjuk mengenai tanda-tanda kecurangan terjadi. Selain itu, berkaitan dengan skema kecurangan yang merupakan model pengelompokan *fraud* yang memiliki tiga kategori yaitu penyalahgunaan aset, korupsi dan kecurangan laporan keuangan.

3. *Red flags*

Red flags secara umum merupakan kondisi yang janggal dari keadaan normal dimana adanya petunjuk atau indikasi mengenai tanda-tanda kecurangan yang terjadi. *Red flags* yaitu sinyal yang patut dapat terdeteksi oleh auditor saat mengaudit laporan keuangan. Tanda-tanda awal seringkali terdapat dalam kasus kecurangan, meskipun begitu adanya tanda-tanda tersebut belum tentu telah terjadi kecurangan. Menurut Grabosky dan Duffield (2001) dalam (Nabila, 2013) menyatakan tanda-tanda kecurangan ialah satu set situasi yang tidak biasa atau berbeda dari aktivitas normal dan merupakan tanda pemberitahuan bahwa sesuatu sedang terjadi diluar dari kebiasaannya dan perlu diinvestigasi.

Dalam pendeteksian *Red flags* auditor harus mempunyai kemampuan mendeteksi dan menerka risiko yang terjadi. *Red flags* berhubungan melalui tanda kecurangan yang dilakukan pada perusahaan klien. Seorang auditor memiliki tanggung jawab demi pendeteksian kecurangan yang ada

pada perusahaan yang diauditnya. Secara detail auditor mengukur risiko salah saji material guna mendapatkan hasil yang kompeten Suartana (2009) dalam (Prasetyo, 2015). Dengan kata lain, *Red flags* merupakan petunjuk adanya sesuatu yang tidak biasa dan perlu penyidikan lebih lanjut. *Red flags* tidak sepenuhnya menunjukkan salah atau tidaknya seseorang akan tetapi merupakan tanda-tanda petunjuk bahwa telah terjadi sebuah kecurangan.

4. Kompetensi

Kompetensi secara umum merupakan keahlian, pengetahuan, sikap dasar dan nilai yang mencerminkan kemahiran berpikir juga bertindak yang sifatnya berkembang, dinamis, rollover serta bisa diraih setiap waktu. Lee dan Stone (1995) dalam (Alnoprika, 2015) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Trotter(1986) dalam Mayangsari (2003) mengartikan seseorang yang kompeten (memiliki keahlian) ialah seseorang yang dengan keterampilannya melaksanakan pekerjaan secara ringan, cepat, intuitif, serta sangat jarang justru tidak pernah membuat kesalahan. Sikap kompetensi diperlukan supaya auditor bisa mendeteksi secara cepat dan tepat, dan ada atau tidaknya kecurangan serta teknik-teknik rekayasa yang dilakukan untuk melaksanakan kecurangan. Ardini dan Suwardjono (2005) dalam (Widiyastuti & Pamudji, 2009) mengatakan untuk mengungkap sebuah kecurangan, auditor membutuhkan kompetensi yang didapatkan dari keahlian(*skill*).

Keahlian (*skill*) merupakan kemahiran seseorang dalam menampilkan tugas fisik atau tugas mental tertentu. Menurut karakteristik kinerja pekerjaan (*job performance criterion*) yang diprediksi, kompetensi dapat dibagi kedalam dua kategori, yaitu kompetensi permulaan atau ambang (*threshold competencies*) dan kompetensi yang membedakan (*differentiating competencies*). Yang pertama (*threshold competencies*) adalah karakteristik esensialminimal (biasanya adalah pengetahuan dan keterampilan) yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat berfungsi efektif dalam pekerjaannya akan tetapi tidak membedakan kinerja pekerja yang superior dan kinerja pekerja yang biasa saja. Kompetensi kategori kedua ialah kompetensi yang membedakan yaitu faktor-faktor yang membedakan antara pekerja yang memiliki kinerja superior dan biasa-biasa saja.

5. Independensi

Independensi secara umum merupakan sikap bebas dari pengaruh, dan tidak dikendalikan oleh pihak lain, serta tidak bergantung pada orang lain. Independensi berarti terdapatnya sifat jujur dari diri seorang auditor untuk mempertimbangkan fakta dan serta adanya pertimbangan obyektif yang tidak memihak dalam diri auditor untuk merumuskan lalu menyatakan opininya. Eric (1975) dalam (Widiyastuti & Pamudji, 2009) mengartikankan independensi adalah hubungan antara akuntan dengan kliennya yang memiliki sifat sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang diberikannya hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti yang

ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip profesionalnya.

Dari (AICPA) *American Institute of Certified Public Accountant* dalam (Prasetyo, 2015) menjelaskan independensi adalah kemampuan bertindak berdasarkan integritas dan juga objektivitas. Berdasarkan Kode etik Akuntan Indonesia pasal 1 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas dalam melaksanakan tugasnya”. Seorang akuntan patut bebas dari segala kepentingan yang dapat dipandang tak sesuai dengan integritas maupun objektivitasnya, tanpa bergantung pada efek yang sesungguhnya dari kepentingan itu sendiri. Dengan mempertahankan integritas akuntan akan bertindak jujur, tegas, dan tanpa pretensi. Serta dengan mempertahankan objektivitas akuntan akan bertindak adil, tanpa dipengaruhi tekanan atau permintaan pihak tertentu ataupun kepentingan pribadi. Menurut Larasati (2005) dalam (Widiyastuti & Pamudji, 2009) independensi terdiri atas 2 komponen, yaitu:

- a. Independensi dalam fakta yaitu ada kejujuran dari dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan ada pertimbangan obyektif yang tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
- b. Independensi dalam keterampilan yaitu adanya sebuah kesan dari masyarakat bahwa auditor bertindak secara independen.

Sehingga, seorang auditor memiliki kewajiban untuk mempertahankan fakta bawah dirinya independen, tetapi juga perlu menghindari keadaan yang dapat membuat pihak luar meragukan keindependensiannya.

6. Skeptisme Profesional

Skeptisme Profesional secara umum merupakan sikap auditor yang selalu mempertanyakan dan mengevaluasi bukti audit secara kritis saat melakukan penugasan (Prasetyo, 2015). Fullerton dan Durtschi (2004) dalam (Suryanto et al. 2017) menemukan bahwa auditor atas skeptisme yang baik akan meningkatkan kemampuan mendeteksi dengan cara meluaskan pencarian informasi tambahan jika ditunjukkan pada tanda-tanda kecurangan. Dalam mendeteksi kecurangan auditor perlu mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan relevan. Tanpa mempergunakan sikap skeptisme profesional, auditor hanya akan mendapatkan salah saji yang disebabkan dari kekeliruan serta sulit untuk menemukan salah saji yang disebabkan dari kecurangan, karena kecurangan umumnya akan disembunyikan oleh pelaku.

Menurut Noviyanti (2008) dalam (Prasetyo, 2015) sikap merupakan kecenderungan psikologis yang diekspresikan dengan mengevaluasi entitas tertentu dengan beberapa tingkat kebaikan atau ketidaksenangan. Dalam aksinya, auditor seringkali kadang terlalu curiga, atau sebaliknya terkadang juga terlalu percaya terhadap asersi manajemen. Padahal semestinya seorang auditor secara profesional menggunakan kecakapannya untuk keseimbangan antara sikap curiga dan sikap percaya.

Hal ini yang sulit diharapkan, apalagi pengaruh di luar diri auditor yang dapat mengurangi sikap skeptisme profesional tersebut. Pengaruh itu bisa berupa kecenderungan orang menghubungkan kejadian positif untuk karakter mereka sendiri namun sikap peristiwa negatif dari faktor eksternal karena auditor dalam melaksanakan tugasnya mendapatkan imbalan dari auditee. Auditor dalam melaksanakan auditnya perlu menggunakan keahliannya secara profesional, tepat dan hati-hati.

7. Skema kecurangan

Skema kecurangan secara umum merupakan model pengelompokan *fraud* yang sering disebut sebagai *fraud tree*. ACFE mengembangkan *fraud tree* dalam 3 kategori yaitu kecurangan laporan keuangan, penyalagunaan aset dan korupsi.

- a. Kecuranga laporan keuangan meliputi tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangan sehingga mendapatkan keuntungan.
- b. Penyalahgunaan aset merupakan bentuk yang paling umum. Berbagai macam transaksi dapat disalahgunakan secara langsung maupun tidak langsung seperti kas, rekening giro, persediaan, pasokan , perlangkapan dan informasi. Hal berikut merupakan penyalahgunaan aset yaitu:
 - 1) Pembebanan ke akun beban yang merupakan pencurian aset yang menciptakan ketidakseimbangan persamaan akuntansi

dasar. Caranya dengan membebankan aset ke akun beban dan mengurangi ekuitas dengan jumlah yang sama.

- 2) Gali lubang tutup lubang menggunakan cek para pelanggan, yang diterima untuk pembayaran tagihan mereka digunakan untuk menutupi uang yang sebelumnya dicuri oleh karyawan.
- 3) Penipuan transaksi berupa penghapusan, perubahan, atau penambahan transaksi yang tidak benar untuk mengalihkan aset tersebut kepada pelaku. Tipe transaksi penipuan tersebut melibatkan pembayaran gaji tipuan ke karyawan yang sebenarnya sudah tidak bekerja.

c. Korupsi adalah sebuah kejahatan yang paling tua. Korupsi merupakan tindakan seorang pejabat atau petugas secara tidak sah dan tidak dibenarkan untuk mendapatkan keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain dengan melanggar kewajiban dan hak orang lain. Jenis korupsi berupa penyuapan, pemberian hadiah yang ilegal, konflik kepentingan, dan pemerasan secara ekonomi.

Dari ketiga kategori tersebut, *fraud tree* dicantumkan dalam 49 skema kejahatan individu yang berbeda (Yanti, 2013). Pemahaman mengenai skema kecurangan (*fraud tree*) ini penting bagi seorang auditor guna membantu dalam pendeteksian kecurangan yang terjadi. Pelaku kecurangan menurut laporan ACFE tahun 2012 mayoritas adalah seseorang dari departmen akuntansi karena ia memahami siklus

bisnis dan lalu lintas uang yang beredar di dalam perusahaan atau instansi.

B. Penurunan Hipotesis

1. *Red flags* terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Red flags ialah sinyal yang patut di deteksi auditor ketika melakukan audit laporan keuangan. *Red flags* secara umum merupakan kondisi yang janggal dari keadaan normal dimana adanya petunjuk atau indikasi mengenai tanda-tanda kecurangan yang terjadi (Prasetyo, 2015). Menurut Grabosky dan Duffield (2001) dalam (Nabila, 2013) menyatakan tanda-tanda kecurangan ialah satu set keadaan yang tidak biasa atau berbeda dengan keadaan normal dan merupakan tanda bahwa sesuatu sedang terjadi diluar dari kebiasaannya sehingga perlu diinvestigasi. Dalam mendeteksi *red flags* auditor perlu memiliki sebuah kemampuan dan dapat mengukur risiko salah saji material dalam laporan keuangan.

Hal tersebut didukung dengan penelitian deskriptif Yanti, (2013) yang melakukan riset pada kelompok Auditor BPK, akuntan internal yang bekerja dalam perusahaan, akuntan pemerintah yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan dan akuntan pendidik pada beberap perguruan tinggi di Yogyakarta dan Jawa tengah dan penelitian dari (Prasetyo, 2015) pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru serta (Arsendy, 2017) yang melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik

di DKI Jakarta menyatakan bahwa *red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Semakin tinggi tingkat *red flags* yang dapat dijumpai auditor maka semakin tinggi kemampuan auditor tersebut dalam mendeteksi kecurangan yang ada. Dengan didapatinya *red flags* ini mampu memudahkan auditor untuk mendeteksi kecurangan serta dengan cepat melakukan tindakan pencegahan. Pengetahuan auditor yang baik mengenai *red flags* akan menjadi kepekaan dalam mendeteksi kecurangan. Dari penjelasan diatas ditarik hipotesis:

H1: *Red flags* berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

2. Kompetensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Seseorang yang berkompetensi merupakan seorang yang memiliki keterampilan dalam mengerjakan tugasnya secara mudah dan cepat serta jarang sekali justru tak pernah membuat kesalahan. Lee dan Stone (1995) dalam (Alnoprika, 2015) mendefinisikan kompetensi sebagai suatu keahlian yang cukup secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Sikap kompetensi dibutuhkan supaya auditor bisa mendeteksi secara cepat dan tepat, dan ada atau tidaknya kecurangan serta teknik-teknik rekayasa yang dilakukan untuk melakukan kecurangan. Kemampuan yang dimiliki oleh auditor dapat

menjadikannya lebih peka terhadap tindakan kecurangan Larasati (2005) dalam (Widiyastuti & Pamudji, 2009).

Hal tersebut di dukung oleh penelitian (Widiyastuti & Pamudji, 2009) yang melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) , penelitian (Simanjuntak, 2012) pada Auditor BPK Perwakilan Sumatera Utara dan (Prasetyo, 2015) pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru , penelitian dari (Trinanda, 2016) pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta serta penelitian dari (Losadi, 2018) yang melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan DIY menyatakan kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi kemampuan auditor tersebut dalam mendeteksi kecurangan yang ada. Tingginya keterampilan atau keahlian seorang auditor akan memberikan hasil yang cukup memuaskan. Sikap kompetensi ini memudahkan auditor dalam mendeteksi kecurangan. Dari penjelasan diatas, ditarik hipotesis:

H2: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

3. Independensi terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Setiap auditor perlu memiliki sikap independensi dalam dirinya. Independensi adalah sikap bebas tanpa terikat tidak memihak kepada siapapun. Sikap independensi juga merupakan kejujuran seorang auditor dalam menyaktakan opininya. Eric (1975) dalam Mayangsari (2003) yang dikutip (Widiyastuti & Pamudji, 2009) mengartikan independensi ialah hubungan antara akuntan dengan kliennya yang memiliki sifat sedemikian rupa sehingga temuan dan laporan yang diberikannya hanya dipengaruhi oleh bukti-bukti yang ditemukan dan dikumpulkan sesuai dengan aturan atau prinsip-prinsip profesionalnya.

Hal tersebut didukung oleh penelitian (Widiyastuti & Pamudji, 2009) yang melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), penelitian dari (Simanjuntak, 2012) pada Auditor BPK Perwakilan Sumatera Utara, penelitian (Karamoy & Wokas, 2015) Pada Auditor Internal Provinsi Sulawesi Utara , penelitian (Prasetyo, 2015) pada Kantor Akuntan Publik di Pekan Baru dan penelitian dari (Trinanda, 2016) pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta serta penelitian dari (Losadi, 2018) yang melakukan penelitian pada auditor yang bekerja di BPKP Perwakilan DIY menyatakan independensi berpengaruh terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Semakin tinggi sikap independensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi juga kemampuannya mendeteksi kecurangan. Sikap independensi membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan merupakan komponen yang akan mempengaruhi kualitas auditor dalam pendeteksian kecurangan. Dari penjelasan di atas, ditarik hipotesis:

H3: Independensi berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

4. Skeptisme Profesional terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Skeptisme merupakan sikap mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi serta keadaan yang terindikasi adanya kemungkinan terjadi salah saji material yang disebabkan oleh kesengajaan, dan penilaian bukti audit secara kritis. Skeptisme profesional auditor ini sikap (*attitude*) yang ada pada dalam diri auditor saat melakukan penugasan audit (Prasetyo, 2015). Skeptisme ialah sikap individual yang dapat berbentuk bawaan, yaitu bagian yang stabil dan bertahan lama yang ada dalam diri individu dan juga situasional yaitu keadaan bersifat sementara yang dipengaruhi oleh situasi Hurtt et al (2010) dalam (Butar & Perdana, 2017). Skeptisme profesional auditor akan mengarahkannya agar menanyakan setiap isyarat yang menunjukkan kemungkinan

terjadinya kecurangan Louwers et al. (2005) dalam (Simanjuntak, 2012).

Hal tersebut didukung oleh penelitian (Simanjuntak, 2012) yang melakukan penelitian seluruh auditor yang aktif bekerja di BPK SUMUT, penelitian dari (Trinanda, 2016) pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian (Arsendy, 2017) pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta dan (Prasetyo, 2015) pada Kantor Akuntan Publik di Pekanbaru menyatakan skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan.

Semakin tinggi sikap skeptisme yang dipunyai auditor maka semakin tinggi kemampuannya dalam mendeteksi kecurangan. Dari penjelasan diatas, ditarik hipotesis:

H4: Skeptisme profesional berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

5. Pemahaman Skema Kecurangan terhadap Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan

Menurut Arens et al. (2011) dalam (Jefri & Mediaty, 2014), terdapat tiga kondisi yang akan menyebabkan terjadinya kecurangan dalam pelaporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Ketiga kondisi tersebut dinamakan dengan segitiga kecurangan (*fraud triangle*) yang terdiri dari tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalitas (*rationalization*). Skema kecurangan sendiri meliputi penyalahgunaan

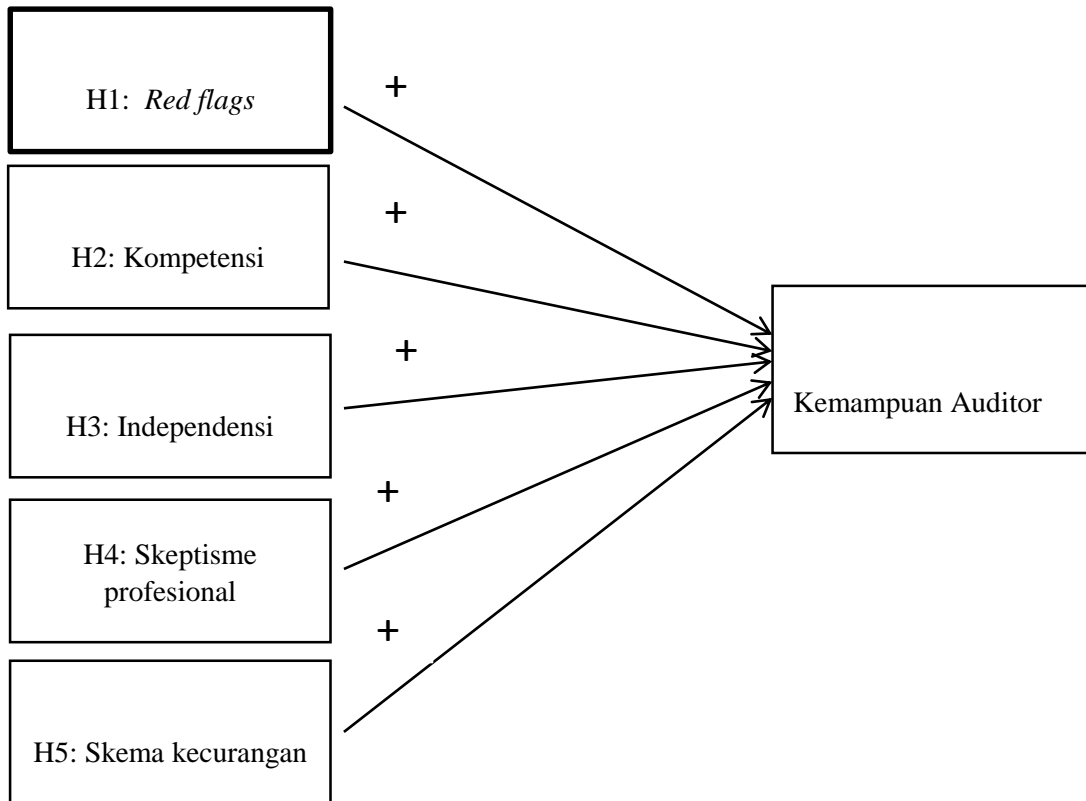
aset, korupsi, dan kecurangan laporan keuangan. Pemahaman mengenai skema kecurangan tersebut memberikan gambaran kualitas audit bagaimana cara mengidentifikasi adanya kecurangan.

Hal tersebut didukung argumen dari hasil penelitian (Koroy, 2009) menyatakan bahwa keberhasilan pendeteksian kecurangan laporan keuangan oleh auditor perlu dilandasi pemahaman sifat, frekuensi dan kemampuan pendeteksian auditor. Hal tersebut didukung pula oleh penelitian dari (Yanti, 2013) yang merupakan penelitian deskriptif dengan hasil bahwa pengetahuan auditor mengenai skema kecurangan adalah baik. Semakin baik pemahaman seorang auditor tentang skema kecurangan maka akan semakin baik juga kemampuan auditor tersebut dapat mendeteksi kecurangan. Banyaknya pemahaman yang auditor miliki akan membantu dalam pendeteksian yang mungkin terjadi dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintah. Dari penjelasan diatas, ditarik hipotesis:

H5: Pemahaman skema kecurangan berpengaruh positif terhadap kemampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan

C. Model Penelitian

Faktor-faktor yang Memengaruhi Kemampuan Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan



Gambar 2.1
Model Penelitian